

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang mempunyai luas wilayah 107.932,72 Km² dengan 12 kabupaten/kota, 156 kecamatan dan 1645 desa/kelurahan. Tercatat sampai tahun 2011 jumlah penduduk di Provinsi Riau sebesar 5.538.367 jiwa yang terdiri dari 2.853.168 jiwa laki-laki dan 2.685.199 perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut sebanyak 1.328.616 rumah tangga yang tersebar di dua wilayah, yaitu sebanyak 817.206 rumah tangga di wilayah perkotaan dan 511.410 rumah tangga di wilayah pedesaan. Persoalan mendasar dalam pembangunan di Provinsi Riau meliputi penanggulangan kemiskinan, pemberantasan ketertinggalan sumberdaya manusia dan pemenuhan infrastruktur yang lebih dikenal dengan program K2I.

Persoalan kemiskinan di Provinsi Riau juga tidak terlepas dari mata pencaharian masyarakat Riau. Bappeda Provinsi Riau (2009), tercatat pada tahun 2009 sebanyak 48,80% masyarakat Riau bermatapencaharian di sektor pertanian. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Riau menggantungkan hidup pada sektor pertanian yang pada umumnya sektor pertanian di daerah pedesaan termasuk disekitar wilayah PTPN-V, sedangkan data BPS Provinsi Riau *dalam* Komara (2010) menyatakan bahwa lebih dari 70% penduduk miskin Riau berada di pedesaan termasuk di wilayah PTPN-V

Kemiskinan adalah suatu situasi di mana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan (daerah/desa) tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan (daerah/desa) tersebut. Individu yang hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika perekonomian

berkembang di suatu daerah/desa, terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik di antara penduduk daerah/desa tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan.

Suatu daerah/desa dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata daerah/desa lain dalam perekonomian tersebut. Secara absolut, daerah/desa dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidup masyarakatnya secara absolut berada di bawah tingkat subsisten. Ukuran subsistensi tersebut dapat diprediksi dengan garis kemiskinan.

Kemiskinan sebagai masalah multidimensional, memerlukan solusi pemecahan yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan. Selama ini telah banyak program yang dilaksanakan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau, baik program yang diinisiasi secara nasional maupun inisiasi daerah, baik yang bersifat sektoral, regional, maupun khusus, seperti P4K, UEDSP, UPPKS, PEMP, PKT, IDT, P3DT, PPK, JPS, PKPS-BBM, PEK dan lain-lain. Selain itu, PT. Perkebunan Nusantara V (persero) selaku koordinator wilayah PKBL BUMN se Provinsi Riau telah melaksanakan *Community Development* (CD) dan CSR untuk pemberdayaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam wilayah kawasan perusahaan. Namun dari berbagai hasil evaluasi, menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini masih belum mampu mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya data informatif tentang masyarakat miskin dan daerah/desa miskin sehingga dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan secara sendiri-sendiri yang menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tumpang-tindih dan salah sasaran.

Sehubungan kondisi tersebut di atas, PT. Perkebunan Nusantara V berpartisipasi dalam mendukung program Kementerian BUMN untuk membangun desa dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Provinsi melalui penelitian mapping daerah/desa miskin di Provinsi Riau.

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud mapping daerah/desa miskin ini untuk menyajikan data aktual tentang daerah/desa miskin di Provinsi Riau, sehingga dapat dipergunakan sebagai data informatif di dalam mendukung program kementerian BUMN untuk membangun desa dalam rangkamengentaskan kemiskinan.

Penyusunan identifikasi data kemiskina ini bertujuan untuk :

- a) Mengidentifikasi jumlah penduduk miskin di setiap desa dalam wilayah studi.
- b) Menganalisis pendapatan desa yang katagori miskin.
- c) Membuat pemetaan desa miskin berdasarkan matapencaharian penduduk dan potensi desa yang dapat dikembangkan.